



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Kinerja/LAKIP tahun 2021. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2021.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Polewali Mandar, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021.

Metode penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2020 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020.

A.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Pedoman dan aturan-aturan yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten polewali Mandar ;
- Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja;
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 ;

A.2. Maksud Dan Tujuan Laporan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta mempunyai tujuan yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban OPD dan untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai dinas daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

B. 2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi :

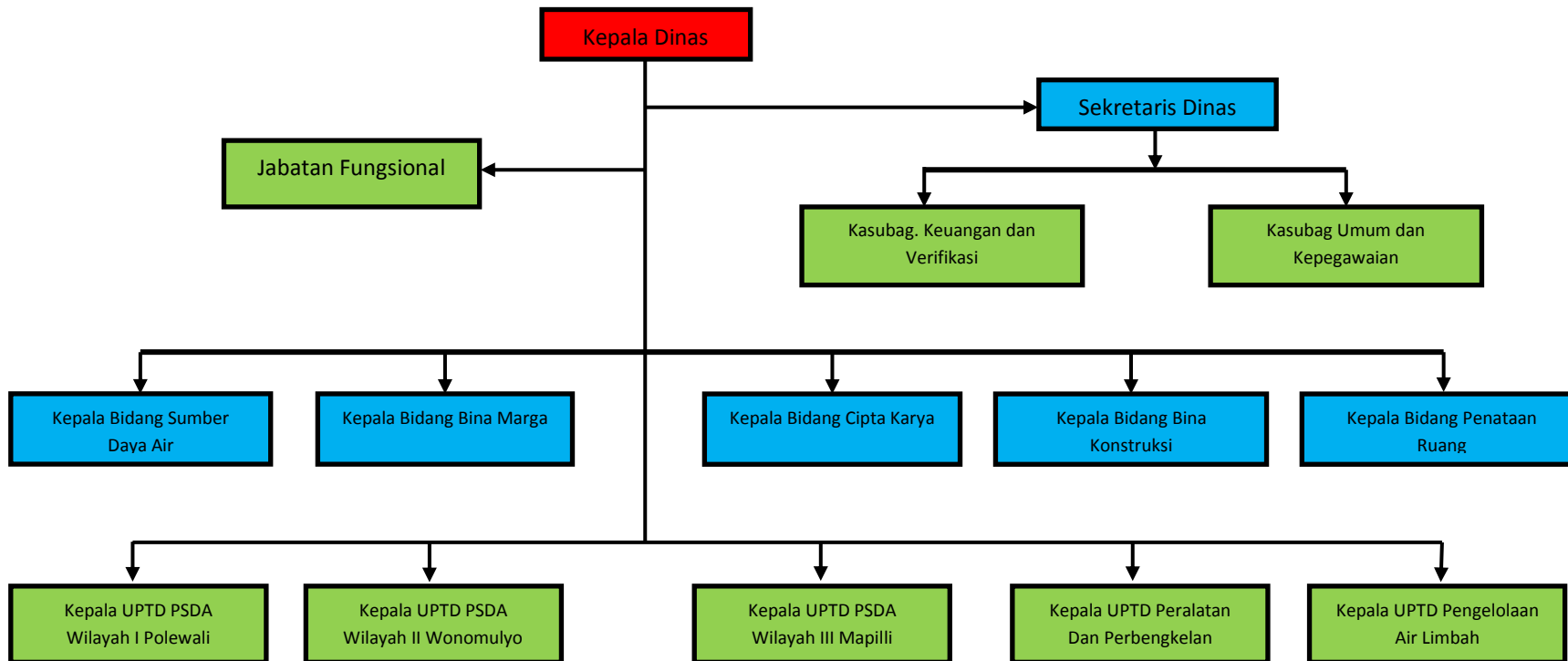
- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- d. Pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. 3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang, UPTD, secara lengkap Struktur Organisasi sebagai berikut. :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR



B.4. Gambaran Umum Kondisi Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - Kasubag Keuangan dan Verifikasi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Bina Konstruksi
- g. Bidang Penataan Ruang
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - UPTD PSDA Wilayah I Polewali & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD PSDA Wilayah II Wonomulyo & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD PSDA Wilayah III Mapilli & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD UPTD Peralatan Dan Perbengkelan & Kasubag Tata Usaha
 - UPTD UPTD Pengelolaan Air Limbah & Kasubag Tata Usaha
- i. Fungsional

➤ **Kondisi Kepegawaian**

Rasio perimbangan antara formasi dan *bezetting* sampai akhir tahun 2021 belum terpenuhi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian

No.	Uraian	Eselon	Formasi	<i>Bezetting</i>	(%)
1.	Kepala Dinas	II-B	1	-	-
2.	Sekretaris Dinas	III-A	1	1	100
3.	Kepala Bidang	III-B	5	5	100
4.	Kasubag	IV-A	7	7	100
6	Kasubag UPTD	IV-B	5	4	80
7	Fungsional	-	16	14	87,5
8	Staff / Tenaga Lapangan	-	341	96	32,84
Jumlah		-	376	127	33,78

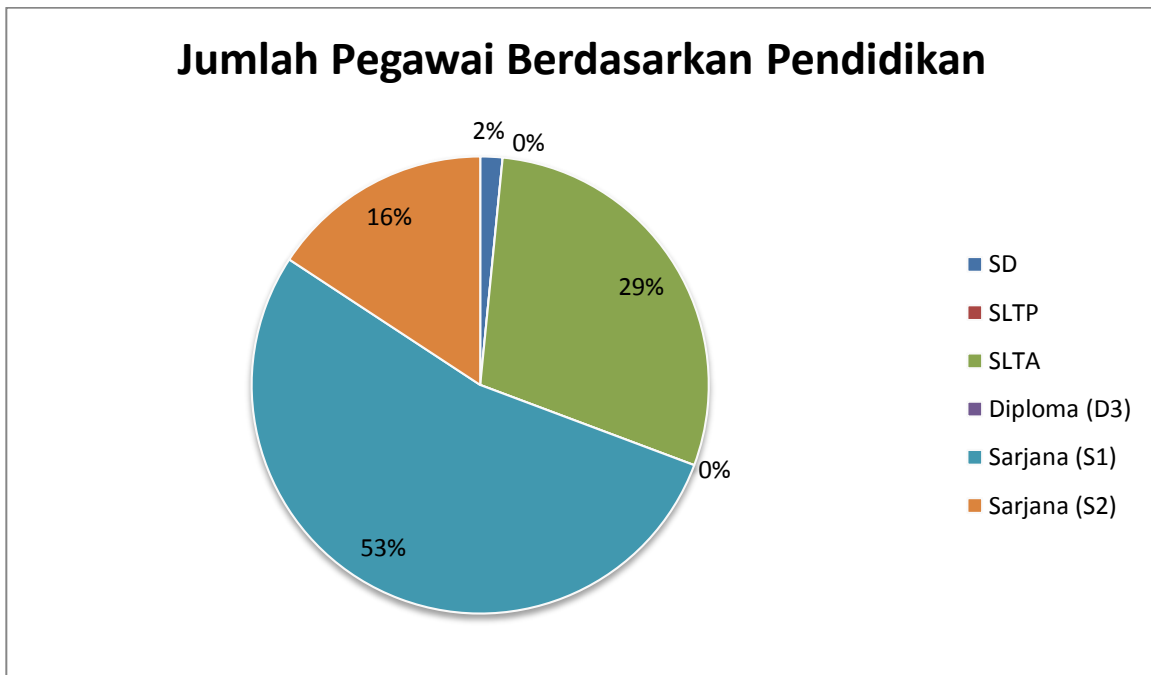
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat untuk posisi Kepala Dinas saat ini lowong sementara Sekretaris Dinas, Kepala Bidang formasinya terisi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Begitupun formasi dilevel Eselon IV-A kecuali Eselon IV-B formasinya lowong 1 pada bagian Kepala UPTD PSDA Wilayah II.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Prosentase
SD	2	0	1,57
SLTP	0	0	0
SLTA	36	1	29,14
D1-D3	0	0	0
S1-DIV	46	22	53,55
S2-S3	14	6	15,75
Jumlah	98	29	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan untuk instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah lulusan Sarjana (S1), sebanyak 68 orang atau sebesar 53,55% dari jumlah pegawai dan yang paling sedikit adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang atau sebesar 01,57%.

Grafik: 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

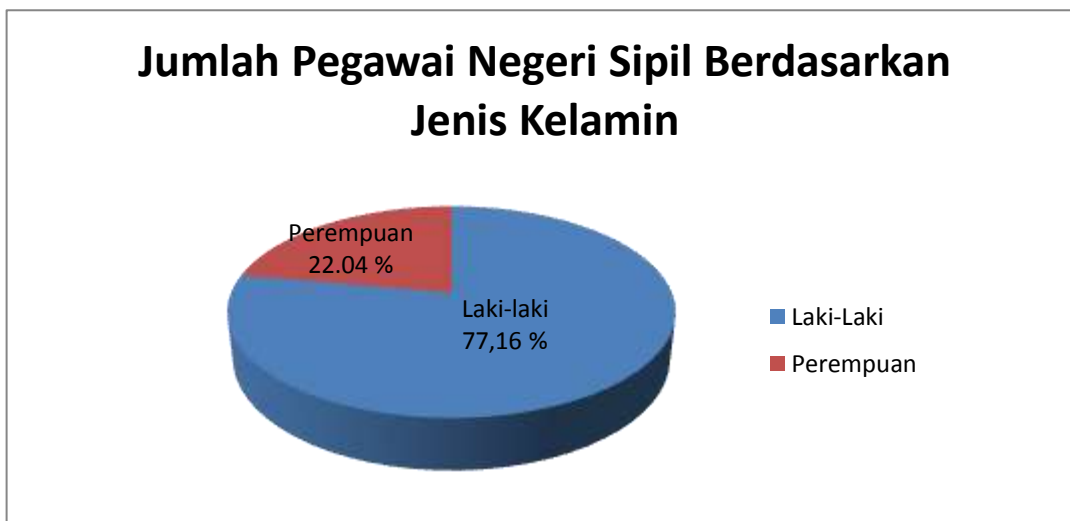


Rendahnya pemahaman dalam bidang teknis dan masih banyaknya pegawai dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum memahami teknologi bidang informatika ke PU-an mengakibatkan pekerjaan pelaporan dan pengolahan data masih belum dapat dikerjakan secara maksimal.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Laki – Laki	98	77.16
2.	Perempuan	29	22.04
.			
Jumlah		127 Orang	

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Grafik 1.2 tersebut jumlah pegawai yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi oleh laki-laki sebesar 77,16%, hal tersebut adalah wajar dikarenakan banyaknya kegiatan fisik di lapangan yang membutuhkan stamina yang prima.

Sedangkan perempuan sebesar 22,04 % merupakan pendukung dalam kelancaran proses kegiatan tersebut.

➤ **Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja antara lain :

- 1 UPTD Workshop dilengkapi dengan alat - alat berat. Alat berat sangat menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ada total 16 unit alat berat yang tersedia di *workshop*, antara lain :

Tabel 1.4 Data Alat Berat

No	Jenis Alat	Merk	Tahun	Kondisi Alat		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	BULDOZER	HITACHI	2003	Baik		
2	MOTOR GREADER	KOMATSU GD 511	2000	Baik		
3	MOTOR GREADER	KOMATSU GD 031	1980		Rusak Ringan	
4	EXCAVATOR	CAT 320	2009	Baik		
5	BOMAG	BOMAG	2007	Baik		
6	BACHO LOADER	CASE	2007	Baik		
7	TRONTON	MITSUBHISI 220	2010	Baik		
8	BOMAG MINI	BOMAG	1995	Baik		
9	EXCAVATOR	SUMITOMO SH 210	2015	Baik		
10	EXCAVATOR	SUMITOMO SH 210	2015	Baik		
11	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009	Baik		
12	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009	Baik		
13	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009	Baik		
14	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009	Baik		
15	DUMPTRUCK	TOYOTA 110	2008	Baik		
16	DUMPTRUCK	TOYOTA 110	2008	Baik		

Gambar 1.2. Alat-alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



2. Laboratorium, berfungsi untuk menguji dan menganalisa bahan material bahan bangunan dan lainnya sebelum digunakan di lapangan ataupun setelah proses pembangunan terlaksana. Ada beberapa alat yang masih dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain :
 - a. Alat uji beton
 - b. Theodolite
 - c. Thermometer aspal

- d. Alat sondir
- e. Alat ukur ketebalan aspal



Gambar 1.3 Alat Uji material Pada Laboratorium UPTD *Workshop*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan tujuan Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dirancang guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

A.1. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**, Untuk merealisasikan visi tersebut diperlukan upaya strategik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal tersebut diperlukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dicapai dengan baik. Melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis ekonomi potensi unggul wilayah

3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

A.2. MISI

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui perannya masing masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi/kabupaten.

Didalam merealisasikan Visi dan misi tersebut telah disusun program- program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2019 – 2024. Terkait misi tersebut diatas yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu pada misi ke tiga dan ke empat.

- **Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.**
- **Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.**

Program dan kegiatan harus mampu memenuhi capaian tujuan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur Jaringan Irigasi

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur Permukiman

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih akuntabel dan Modern

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan fisik di Kabupaten Polewali Mandar, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull and push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian dimasa mendatang, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal (*local economic development*) yang ada dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu di dalam perencanaan dan pembangunan suatu infrastruktur, maka prinsip efisien, efektif, ekonomis, optimal dengan asas pemberdayaan masyarakat melalui jalur penjangkaran aspirasi masyarakat (*bottom up - top down*) senantiasa dikembangkan dan diterapkan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

A.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya tentu harus dirumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dalam penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas, yang mampu memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar adalah :

- | | |
|------------------|---|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan kualitas pembangunan Infrastruktur |
| Sasaran 1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi |
| Program | Program Penegelolaan Sumber Daya Air (SDA) |

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Program

Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

Program

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

- Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan 2

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih akuntabel dan modern

Sasaran 4

: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

- Program/ Kegiatan : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- Program/ Kegiatan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Polewali Mandar tahun 2021. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2021 tersebut diuraikan sasaran-sasaran, indikator kinerja, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	80,87%
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	55,40%
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	80,87%
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	71,88%
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

Tabel 2.2: Program dan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 5.423.567.848	APBN/ APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 42.855.663.500	APBN/APBD
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 19.687.332.400	APBN/APBD
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.297.257.600	APBN/APBD
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 4.218.647.250	APBD
6	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 751.576.600	APBD
7	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 31.993.100.000	APBD
8	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 751.576.600	APBD
9	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 649.996.700	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 540.000.000	APBD
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.314.049.337	APBD

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan anggaran. Dibawah ini kami lampirkan anggaran perubahan setelah Revisi.

Tabel : 2.3 Program dan Anggaran Kegiatan Perubahan setelah Revisi

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 6.122.542.948	APBN/APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 43.993.304.780	APBN/APBD
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 15.447.985.400	APBN/APBD
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.297.257.600	APBN/APBD
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 4.363.074.700	APBD
6	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 751.576.600	APBD
7	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 33.395.680.015	APBD
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 649.996.700	APBD
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 540.000.000	APBD
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.694.782.354	APBD

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	Meter	5500	1898
		Jumlah Bendung yang Ditingkatkan	Unit	3	3
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang di Bangun	Meter	150	160
		Normalisasi /Restorasi Sungai	Meter	400	2385
		Jumlah Bendung Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Unit	44	40
		Jumlah Laporan Polisi Khusus Sumber Daya Air	Dokumen	12	12
		Jumlah Saluran Irigasi yang Dipelihara (Galian Sedimen)	DI	6	6
		Jumlah Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Sumber Daya Air (UPTD PSDA)	UPTD	3	3
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan	KM	4	19,820
		Panjang jalan kabupaten yang terpelihara	KM	50	25,034
		Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhab	5	Unit	4
		Panjang jalan Kabupaten yang di inspeksi	KM	874.766	874.766
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	Unit	50	50
		Jumlah Alat Berat yang dipelihara	Unit	2	1
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum	Jumlah Jiwa	7800	7785
		Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak	Jumlah RT	500	350
		Panjang drainase yang terbangun	Meter	5285	4472
		Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan	Meter	711	655

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun	Unit	7	9
		Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	15	128
		Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang diawasi	Perusahaan	50	50
		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jenis	11	11
		Jumlah Dokumen RRTR	Dokumen	1	1
		Jumlah Laporan / Orang Sosialisasi	Orang	1000	1000
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	46	46

Melihat tabel di atas realisasi indicator kegiatan ada yang mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target namun ada juga yang tidak mencapai target yaitu indikator kegiatan diantaranya:

1. Panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi
2. Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum
3. Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak
4. Panjang drainase yang terbangun
5. Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan
6. Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi
7. Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhab
8. Jumlah Alat Berat yang dipelihara

Banyaknya kegiatan yang tidak mencapai target disebabkan adanya refocusion anggaran untuk penanggulangan covid 19.

Ada beberapa indikator kegiatan yang mencapai target bahkan ada indikator kegiatan yang melampaui dari target adalah:

1. Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan
2. Normalisasi /Restorasi Sungai
3. Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun
4. Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perturan Menteri Negara Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. program/kegiatan dimasa yang akan datang.

A.1. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan akses jalan dan jembatan sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

A.1.1 Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kegiatan ini sasaran utamanya adalah meningkatkan *aksesibilitas* dan *interkoneksi* antar wilayah, dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan dari jalan tanah menjadi jalan sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan perintisan jalan menuju kawasan potensial untuk dikembangkan. Terkait Indikator ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pembangunan Jalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.43.993.304.780,-Anggaran APBD Kabupaten

sebesar Rp.30.237.144.780,- dan Anggaran APBN Rp.13.756.160.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.39.409.503.929,- 89,58%.

Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan Pembangunan Jalan Kabupaten 4000 Km yang terealisasi sepanjang 19,820 Km,. Adapun kegiatan Pembangunan Jalan dan adalah :

Tabel 3.1 Pembangunan jalan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Palatta – Tapua	2,204 km	Rp. 4.840.000.000	DAK
2	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Labasang-Pelitakan	1,400 km	Rp. 2.921.160.000	DAK
3	Peningkatan Jalan Ruas Kuajang – Batetangga	2,080 km	Rp. 3.783.750.000	DAK
4	Peningkatan Jalan Ruas Amassangan - Batetangga	0,923 km	Rp. 1.261.250.000	DAK
5	Peningkatan Jalan Ruas Bulo – Karombang	1,350 km	Rp. 1.364.000.000	DAU
6	Peningkatan Jalan Ruas Kebunsari – Pucceda	0,696 km	Rp. 740.000.000	DAU
7	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Mambu - Tabbasala	0,646 km	Rp. 1.110.000.000	DAU
8	Peningkatan Jalan Ruas Rea Barat – Tabone	0,593 km	Rp. 740.000.000	DAU
9	Peningkatan Jalan Ruas Galeso – Mampie	0,512 km	Rp. 1.200.650.000	DAU
10	Peningkatan Jalan Ruas Polewali – Mammi	0,443 km	Rp. 499.500.000	DAU
11	Peningkatan Jalan Ruas Rumpa – Arjosari	0,398 km	Rp. 499.500.000	DAU
12	Peningkatan Jalan Ruas Matakali – Barumbung	0,295 km	Rp. 334.500.000	DAU
13	Peningkatan Jalan Ruas Mapilli – Piriang	5,293 km	Rp.10.000.000.000	DAU

14	Peningkatan Jalan Ruas Tammangalle – Mosso (Lanjutan)	1,169 km	Rp. 1.320.000.000	DAU
15	Peningkatan Jalan Ruas Tanganbaru – Saragian	0,446 km	Rp. 462.500.000	DAU
16	Peningkatan Jalan Ruas Lilli – Patambanua	0,300 km	Rp. 499.500.000	DAU
17	Peningkatan Jalan Ruas Pambusuang – Lego	0,255 km	Rp. 506.000.000	DAU
18	Peningkatan Jalan Ruas Tenggelang – Pessunan	0,817 km	Rp. 999.000.000	DAU

Gambar 3.1 Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Palatta-Tapua



Kondisi 0%

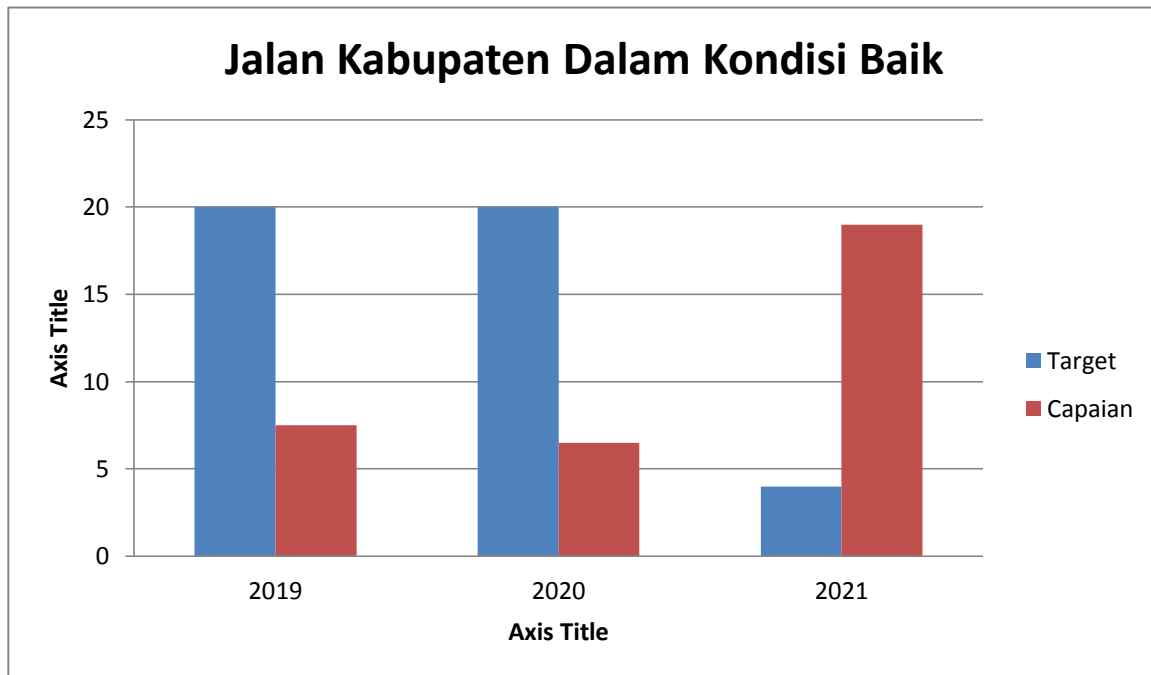


Progres 100%

Tabel: 3.2. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang terbangun	20 km	7,5 km	20 km	6,5 km	4 km	19 km

Grafik 3.1. Perbandingan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019, 2020 dan 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan melampaui dari target. Dalam pelaksanaannya kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Perlunya peningkatan kualitas jalan pada beberapa titik
2. Tingkat kerusakan jalan lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan jalan

3. Data dasar kondisi infrastruktur jalan belum akurat
4. Anggaran pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan terbatas
5. Pembebasan lahan untuk pembangunan/fperintisan jalan masih terkendala

Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/ penggantian jalan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia
2. Update data/ inventarisasi kondisi jalan
3. Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan.

➤ **Panjang Jalan yang di Pelihara**

Tahun 2021 ditargetkan jalan dalam kondisi baik 50 Km namun yang terealisasi hanya sepanjang 25,032 Km tidak tercapainya target di karenakan keterbatasan anggaran dikarenakan anggaran mengalami refocusing untuk penanganan covid 19. Adapun kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan dan adalah :

Tabel 3.3. kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan :

No	Nama Paket Kegiatan	Volume	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Jalan Ruas Paku-Amola	2,500 km	DAU
2	Pemeliharaan Jalan Ruas Batetangnga - Kaleo	2,500 km	DAU
3	Pemeliharaan Jalan Pukkepi (Penimbunan/Pengerasan)	4,500 km	DAU
4	Pemeliharaan Jalan Ruas Laliko – Suruang	4,300 km	DAU

5	Peningkatan Jalan Ruas Tibung – Bulobulo	2,500 km	DAU
6	Pemeliharaan Jalan Ruas Desa Ambopadang	2,200 km	DAU
7	Pemeliharaan Jalan Ruas Longsor di Kec. Bulu	0,350 km	DAU
8	Pemeliharaan Jenbatan Kurri-Kurri Kel. Anreapi	0,250 km	DAU
9	Pemeliharaan Jalan Ruas Pemuda	0,680 km	DAU
10	Pemeliharaan Jalan Ruas Gatot Subroto	2,500 km	DAU
11	Pemeliharaan Jalan Ruas Cokroaminoto	1,750 km	DAU
12	Pemeliharaan Jalan Desa Pullewani	1,000 km	DAU

➤ **Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik**

Ditahun 2021 ditargetkan jumlah alat berat yang di pelihara 2 unit namun karena keterbattasan anggaran hanya 1 unit saja yang dapat dipelihara tahun ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.800.000,-.

A.1.2 Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik

Jembatan merupakan akses penghubung yang menghubungkan wilayah yang terpisahkan oleh aliran sungai sehingga *interkoneksitas* antar wilayah dan kawasan akan semakin lancar yang pada akhirnya akan memperlancar perputaran roda perekonomian masyarakat. Pada tahun 2021 ditargetkan pembangunan/rehabilitasi 5 (Lima) unit jembatan dan terealisasi 4 (Empat) unit.

Tabel: 3.4 Kegiatan Pembangunan/Penggantian Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Jembatan Penghubung antar Desa Dakka dan desa Jambumalea	14 meter	Rp. 2.850.000.000	DAU
2	Pembangunan Jembatan Timbo (Ruas Jalan Oting – Tammajarra)	5 meter	Rp. 480,000,000	DAU
3	Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung Kec. Anreapi	35 meter	Rp. 950,000,000	DAK
4	Pembangunan Jembatan Dusun Massamba Desa Arjosari Kec. Wonomulyo	12 meter	Rp. 480,000,000	DAU

Gambar 3.2. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Kecamatan Anreapi



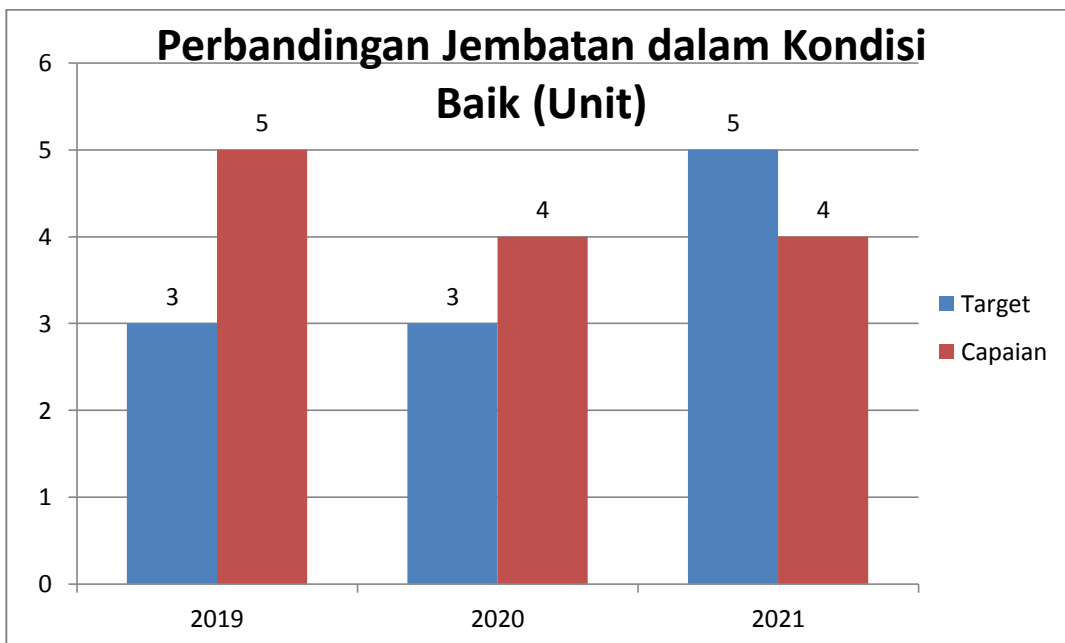
Kondisi 0%

Progres 100%

Tabel 3.5. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	3	5	3	4	5	4

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019, 2020 dan 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa target Jembatan dalam kondisi baik di tahun 2021 tidak mencapai target di sebabkan keterbatasan anggaran.

A.2. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI

Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk memelihara sumber-sumber air, jaringan irigasi, pembangunan/ pemeliharaan turap/talud/bronjong dan mengurangi kerusakan-kerusakan. Ada dua kegiatan pada program ini yakni :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.1.746.032.638,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.516.143.370,- 86,83%.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4.376.510.310,-. Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.1.683.654.310,- dan Anggaran APBN Rp.2.692.856.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.406.015.197,- 77,82%.

A.2.1. Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi semi teknis dan teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menyuplay kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat diatur dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang lebih baik.

Hingga saat ini jumlah Daerah Irigasi yang tersedia sebanyak 41 Daerah Irigasi dengan panjang jaringan irigasi yang direhab pada tahun 2021 yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk mencapai indikator sasaran ini maka program yang dirancang yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan uraian kegiatan yaitu :

- A. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, output kegiatan ini Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi dengan menargetkan 5.500 meter namun dengan keterbatasan anggaran realisasi tidak mencapai hanya sebesar 1.898 meter. Adapun kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan antara lain :

Tabel 3.6 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Amola	1 Paket	Rp. 539,880,000	DAK
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bunga-Bunga	1 Paket	Rp. 749.823.000	DAK
3	Rehabilitasi Jaringan Irigan DI. Nene Bece	1 Paket	Rp. 521.139.000	DAK
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Papandangan 1	1 Paket	Rp. 756.724.000	DAK
5	Biaya Penunjang Kegiatan	1 Paket	Rp. 125.290.000	

Gambar 3.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bunga - Bunga Kecamatan Matakali



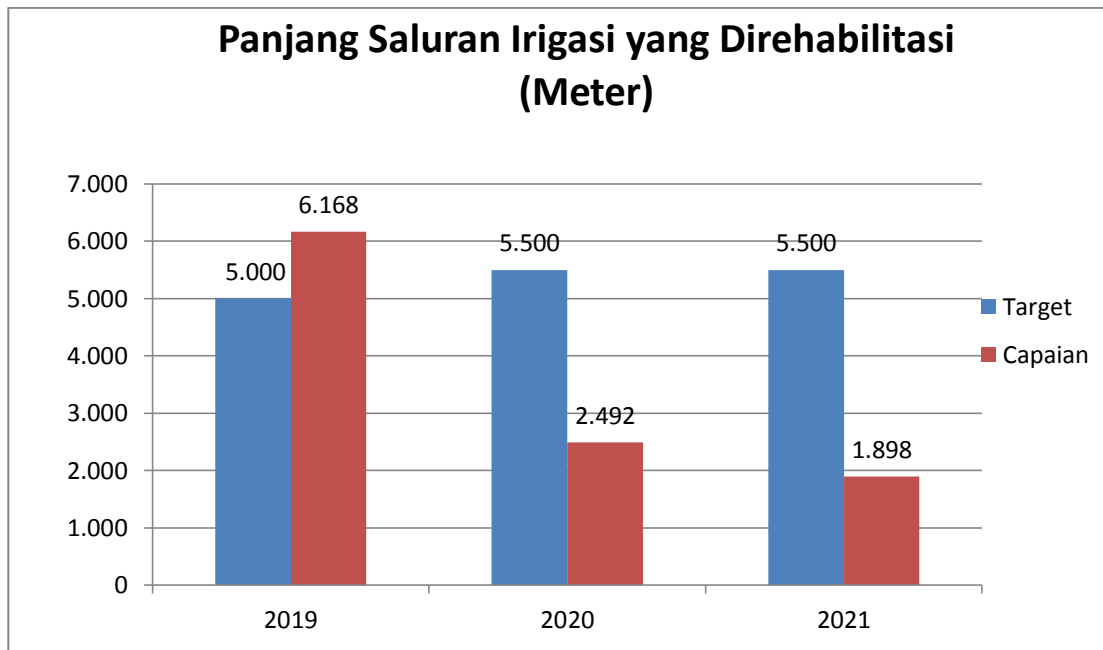
Progres 0% (MCO)

Progres 100%

Tabel 3.7 Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	5000 meter	6.168 meter	5.500 meter	2.492 meter	5.500 meter	1.898 meter

Grafik 3.3 Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2019, 2020 dan 2021



Dalam pelaksanaannya kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Rendahnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi
2. Lemahnya pengawasan terhadap penegakan perda irigasi

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap penegakan perda pengairan dan polisi pengairan.

➤ **Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi ini focus pada pemeliharaan di pintu air irigasi. Adapun kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi adalah :

Tabel 3.8 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Tapango	1 paket	Rp 10,000,000	DAU
2	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Palatta	1 paket	Rp. 10,000,000	DAU
3	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Nene Bece	1 paket	Rp. 10,000,000	DAU
4	Alat Ukur Permukaan Air Di. Mambu Batu, Palatta, Matakali, Tapango, Bunga-bunga	1 paket	Rp 12,000,000	DAU
5	Alat Ukur Permukaan Air Di. Alapahang	1 paket	Rp 3,200,000	DAU
6	Alat Ukur Permukaan Air Di. Paneppe	1 paket	Rp 1,600,000	DAU
7	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Tapango	1 paket	Rp 16,000,000	DAU
8	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Sulewatang	1 paket	Rp 16,000,000	DAU
9	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Mambu Batu	1 paket	Rp 16,000,000	DAU
10	Pintu air Bangunan Irigasi D.I. Lemo	1 paket	Rp 15,000,000	DAU
11	Papan Informasi Operasi Saluran D.I. Rappang Curede	1 paket	Rp 15,000,000	DAU
12	Papan Informasi Operasi Saluran D.I. Rappang Curede	1 paket	Rp. 10.000.000	DAU

Gambar 3.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Alapahang kecamatan Tapango



Dalam pelaksanaannya kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Rendahnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran untuk membiayai Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air.

A.2.2. Bendung Dalam Kondisi Baik

➤ Panjang Sungai Yang Dipelihara

Kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai ini fokus pada pengerukan sedimen (Pasir) di dasar sungai, Adapun kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai adalah:

Tabel 3.9 kegiatan Normalisasi/ Restorasi Sungai

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Banato Rejo	45,50 meter	199.993.762,15	DAU
2	Perkuatan Tebing sungai Kunyi	191,50 meter	199.993.762,15	DAU

A.3. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Salah satu faktor dalam peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Polewali Mandar adalah penyediaan fasilitas air bersih. pembangunan sanitasi dan saluran drainase. Masih banyaknya warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih serta untuk mendukung program *Sustainable Development Goal* (SDGs) yaitu pada tahun ini diharapkan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Hal tersebut sangat penting dan mendasar sehingga program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas permukiman setiap tahun dianggarkan. Ada beberapa OPD yang terlibat dalam peningkatan kualitas permukiman ini yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

A.3.1. Panjang Drainase Yang Terbangun

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya terutama masyarakat pedalaman adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan pembangunan drainase sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.4.363.074.700,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.3.952.817.260,- 90,59%.

Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan tahun ini fokus pada 6 kecamatan diantaranya adalah :

Tabel 3.10 Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Drainase Lingkungan BTN Stadion Kel. Madatte	278 meter	Rp. 172.721.000	DAU
2	Pembangunan Drainase Linomaloga Kec.Polewali	165 meter	Rp. 114.026.000	DAU
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Belawa	100 meter	Rp. 85.084.000	DAU
4	Pembangunan Drainase Jalan Kartini	1.150 meter	Rp. 1.264.518.000	DAU
5	Pembangunan Drainase Jalan Pusat Pelatihan Pramuka dan PMR Kel. Darma	104 meter	Rp. 103.740.000	DAU
6	Pembangunan Drainase Jalan Terong Kel.Wattang Kec. Polewali	25 meter	Rp. 138.211.000	DAU
7	Rehab Saluran Drainase Alun-alun Polewali	260 meter	Rp. 177.445.000	DAU
8	Pembangunan Drainase Desa Sumberjo	290 meter	Rp. 165.788.000	DAU
9	Pembangunan Drainase Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo	280 meter	Rp. 176.299.000	DAU
10	Pembangunan Drainase Kec. Matakali	260 meter	Rp. 150.244.000	DAU
11	Pembangunan Drainase Kel. Mapilli Kec. Mapilli	237 meter	Rp. 176.214.000	DAU
12	Pembuatan Drainase Kel. Pappang Kec. Campalagian	273,5 meter	Rp. 165.886.000	DAU

13	Pembangunan Drainase Kel. Mapilli Kec. Mapilli	276 meter	Rp. 165.690.000	DAU
14	Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Matakali Kec. Matakali	160,7 meter	Rp. 264.048.000	DAU

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Drainase Jalan Kartini

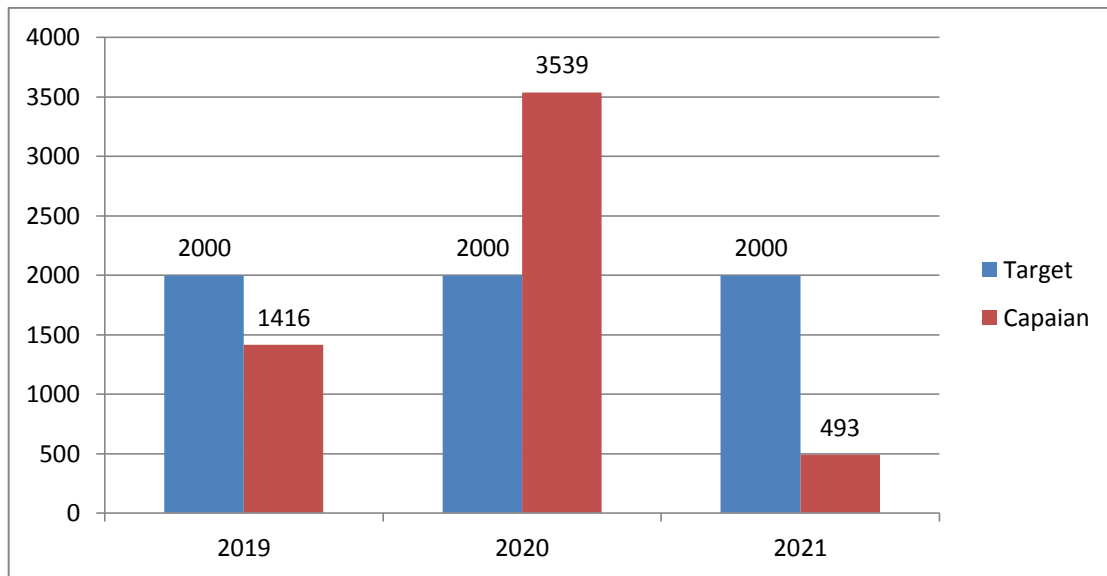


Tabel 3.11 Perbandingan Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan Tahun 2018, 2019 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Panjang drainase yang terbangun	2000	1416	2000	3539	2000	493

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan terbatasnya anggaran.

Grafik 3.4 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang terbangun Tahun 2019, 2020 dan 2021



Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Permasalahan sampah yang menyumbat aliran drainase
2. Pembuangan saluran air di bawah trotoar tidak berfungsi dengan baik.

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Butuh kesadaran semua pihak untuk memelihara lingkungan khususnya drainase.
2. Perlu penanganan terhadap saluran pembuang di bawah trotoar.

A.3.2. Pembangunan Jalan Lingkungan

Tahun 2021 Pembangunan Jalan Lingkungan di fokuskan pada kecamatan Polewali di sebabkan masih banyak jalan lingkungan di pinggiran kota Polewali yang belum layak. Pada kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.751.576.600,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.706.100.700,-.93,95%. Adapun kegiatan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan adalah :

Tabel 3.12 Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Belawa Kel. Madatte	138.60 meter	Rp. 127.065.696	DAU
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Gernas Kel. Madatte	206 meter	Rp. 238.957.488	DAU
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Samping Askes	115 meter	Rp. 142.236.600	DAU
4	Pembangunan Jalan Lingkungan Tanro Timur	115 meter	Rp. 165.942.700	DAU
5	Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Lingkungan	-	Rp. 26.536.198	DAU
6	Jasa Konsultan Pengawasan Jalan Lingkungan	-	Rp. 19.970.018	DAU

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belawa

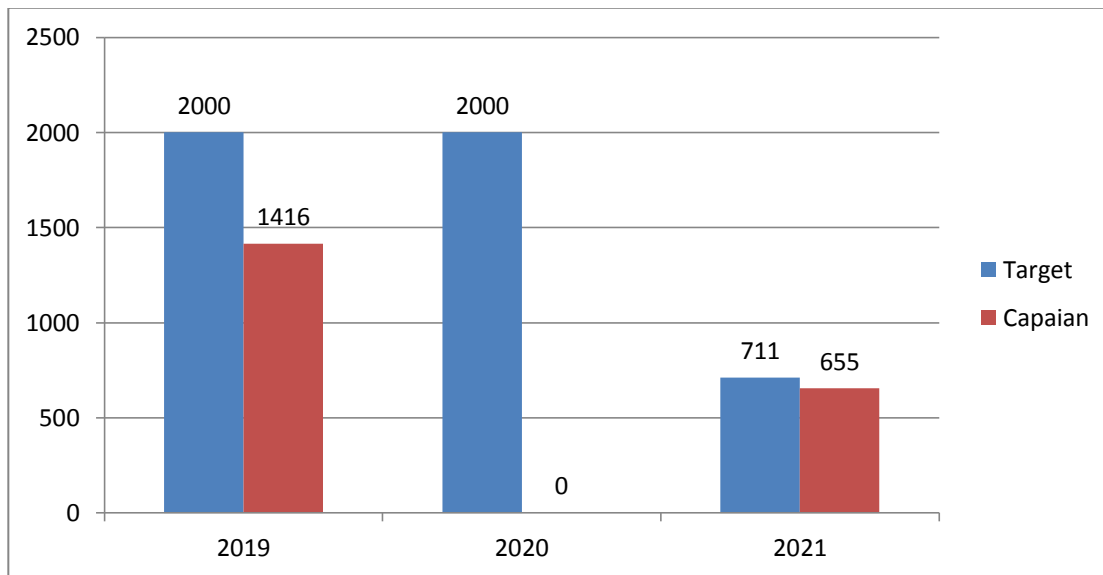


Tabel 3.12 Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	2000	1416	2000	-	711	655

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan terbatasnya anggaran.

Grafik 3.5 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2019, 2020 dan 2021



Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Terkait pembebasan lahan yang belum jelas
2. Minimnya anggaran pembangunan Jalan Lingkungan.

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan
2. Penyediaan anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan.

A.3.3. Pembangunan Sarana dan Prasana Air Minum

Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, di tahun 2021 pembangunan SPAM tersebar di 8 kecamatan. Pada kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15.447.985.400,-. Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.324.602.404,- dan Anggaran APBN Rp.13.123.383.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.14.661.620.800,- 95%. Di tahun 2021 menargetkan jumlah jiwa yang terlayani air minum sebesar 7800 jiwa namun yang terealisasi sebesar 7885 jiwa. Adapun kegiatan untuk Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan adalah :

Tabel 3.13 Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Batetangga Kecamatan Binuang	120 SR	Rp 1,590,143,000	DAK
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Puppuring Kecamatan Alu	75 SR	Rp 1,071,600,000	DAK
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tubbi Kecamatan Tutar	98 SR	Rp 973,826,000	DAK
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Anreapi Kecamatan Anreapi	120 SR	0Rp. 818,700,000	DAK
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Duampanua Kecamatan Anreapi	300 SR	Rp. 1,884,606,000	DAK
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli	326 SR	Rp. 2,070,120,000	DAK
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lego Kecamatan Balanipa	175 SR	Rp. 1,243,232,000	DAK

8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Salarri Kecamatan Limboro	90 SR	Rp. 818,160,000.00	DAK
9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sattoko Kecamatan Mapilli	133 SR	Rp.930,276,000.00	DAK
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Todang Todang Kecamatan Limboro	120 SR	Rp. 1.722.720.000	DAK

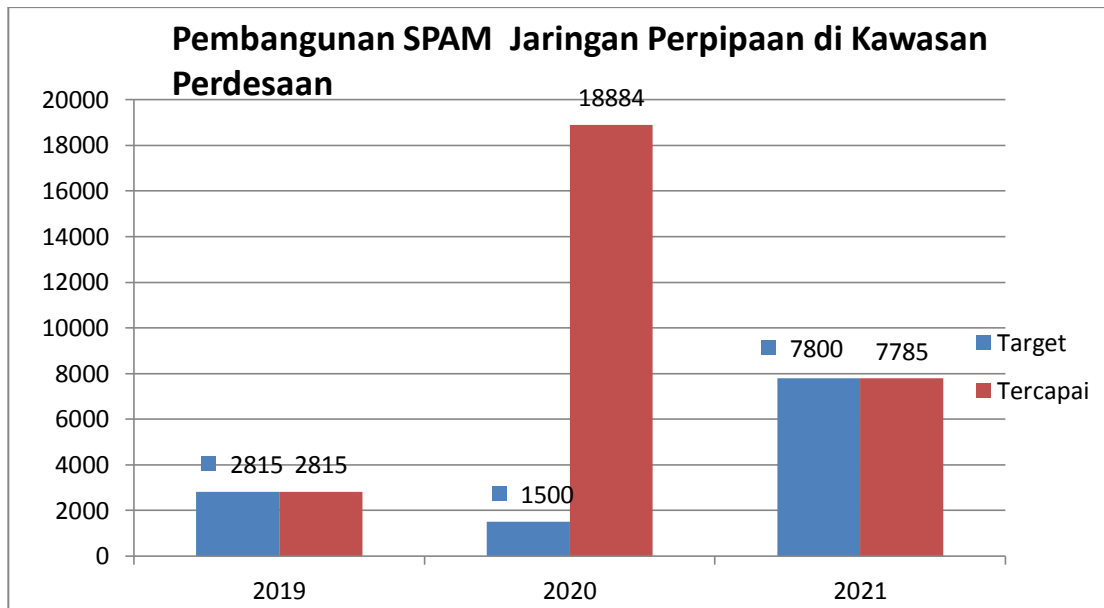
Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Landi Kanusuang



Tabel: 3.14 Perbandingan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum	1500 jiwa	2815	1500 jiwa	18.884 jiwa	7800 jiwa	7785 jiwa

Grafik: 3.6 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2019, 2020 dan 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan tidak mencapai target di sebabkan adanya refocusing anggaran.

A.3.4. Peningkatan Sistem Pengelolaan air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Ditahun 2021 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Pada kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.297.257.600,-.

Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 795.649.900,- dan Anggaran APBN Rp.4.501.607.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.5.194.941.200,- 97%. dengan menargetkan jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi yang layak sebesar 500 RT namun yang teralisasi 256 RT tidak tercapainya target terbatasnya anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan untuk Peningkatan Sistem Pengelolaan air Limbah adalah :

Tabel 3.15: Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Desa Samasundu Kecamatan Limboro	25 KK	Rp 350.000.000	DAK
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Desa Tonyaman Kecamatan Binuang	25 KK	Rp 345.843.000	DAK
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Kel Takatidung Kecamatan Polewali	25 KK	Rp 350.000.000	DAK
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Kelurahan Limboro Kecamatan Limboro	25 KK	Rp 350.000.000	DAK
5	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli	25 KK	Rp 350.000.000	DAK
6	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel Darma Kecamatan Polewali	50 KK	Rp 375.000.000	DAK
7	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Kel Madatte Kecamatan Polewali	50 KK	Rp 375.000.000	DAK
8	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK Desa Lembang Lembang Kecamatan Limboro	25 KK	Rp 375.000.000	DAK Afirmasi

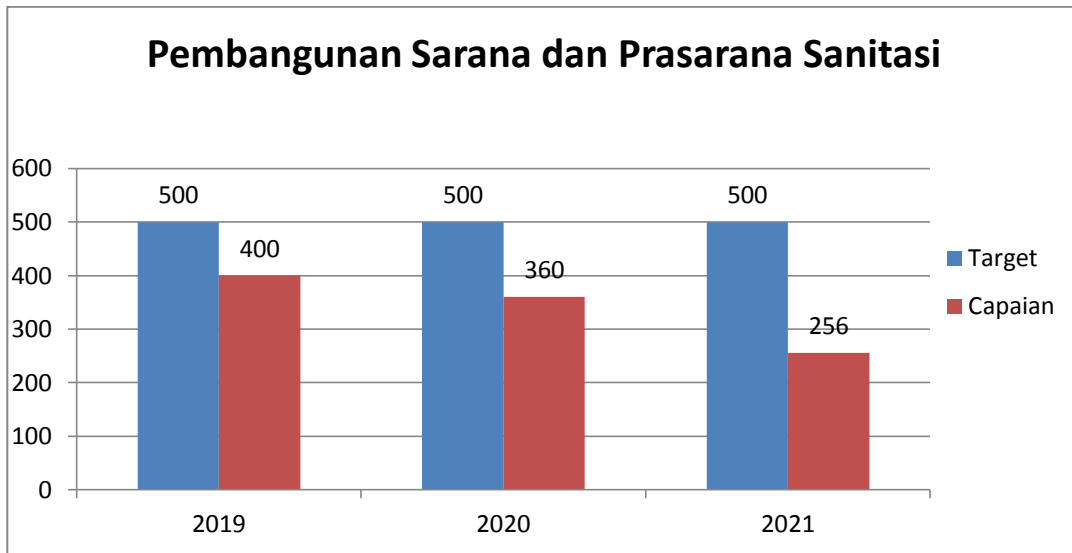
9	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo	25 KK	Rp 400.000.000	DAK
10	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa	25 KK	Rp 425.264.000	DAK
11	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Dengan Jumlah Layanan Minimal 25 KK Desa Renggeang Kecamatan Limboro	25 KK	Rp 450.000.000	DAK
12	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 25 KK Desa Tammangalle K	25 KK	Rp 335.000.000	DAK

Tabel 3.16 Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak	500	400	500	360	500	256

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan terbatasnya anggaran.

Grafik: 3.7 Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2019, 2020 dan 2021



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan tidak mencapai disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Kel. Darma, Kec. Polewali



Progres 0% (MC0)

Progres 100%

Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Air Bersih) memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.
2. Lokasi sumber air baku pada sebagian wilayah berada jauh dari permukiman masyarakat sehingga membutuhkan material pipa yang tidak sedikit, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran
3. Pemanfaatan asset belum maksimal disebabkan beberapa lokasi sudah terpasang jaringan pipa distribusi masyarakat namun belum terkoneksi dengan PDAM

Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Menyiapkan master plan sumber air baku jaringan pipa untuk kawasan perkotaan, wilayah perdesaan dan pesisir
2. Mengendalikan penebangan pohon atau meningkatkan penghijauan di sekitar sumber air baku.
3. Memaksimalkan peran serta masyarakat pemanfaat dalam pemeliharaan sumber air baku, pembangunan jaringan perpipaan agar biaya yang ditimbulkan dapat di tekan dan kualitas air bisa dipertahankan
4. Meningkatkan koordinasi antara PDAM dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai penyerahan asset dan penyediaan air bersih.

A.4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

A.4.1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum Kondisi Baik

Ditahun 2021 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam Program Peningkatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.395.680.015,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.584.479.595,-. Jumlah Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum yang ditargetkan di bangun tahun 2021 ini sebanyak 7 unit yang terealisasi hanya 9 unit. Kegiatan ini melampaui dari yang di targetkan sebelumnya. Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum yang terbangun di tahun anggaran 2021 ini yaitu :

Tabel 3.18 Kegiatan Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Asrama Mahasiswa Jogja Tahap I	1 Paket	Rp. 1.500.000.000	DAU
2	Pembangunan Kantor Camat Luyo	1 Paket	Rp. 2.000.000.000	DAU
3	Pembangunan Kantor Inspektorat (Rehab lantai 2 kantor Dinas Pendidikan)	1 Paket	Rp. 1.750.000.000	DAU
4	Pembangunan Mesjid Jalan Kartini Tahap 2	1 Paket	Rp. 9.800.000.000	DAU

5	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Tahap 2	1 Paket	Rp. 11.425.000.000	DAU
6	Rehab Asrama Mahasiswa Alauddin Makassar	1 Paket	Rp. 100.000.000	DAU
7	Rehab Asrama Mahasiswa Putri Tello Makassar	1 Paket	Rp. 200.000.000	DAU
8	Pembangunan Tribun Lapangan Bonde	1 Paket	Rp. 187.000.000	DAU
9	Pembangunan Tribun Lapangan Pancasila	1 Paket	Rp. 3.373.000.000	DAU

Gambar 3.8 Dokumentasi Pembangunan Tribun Lapangan Bonde

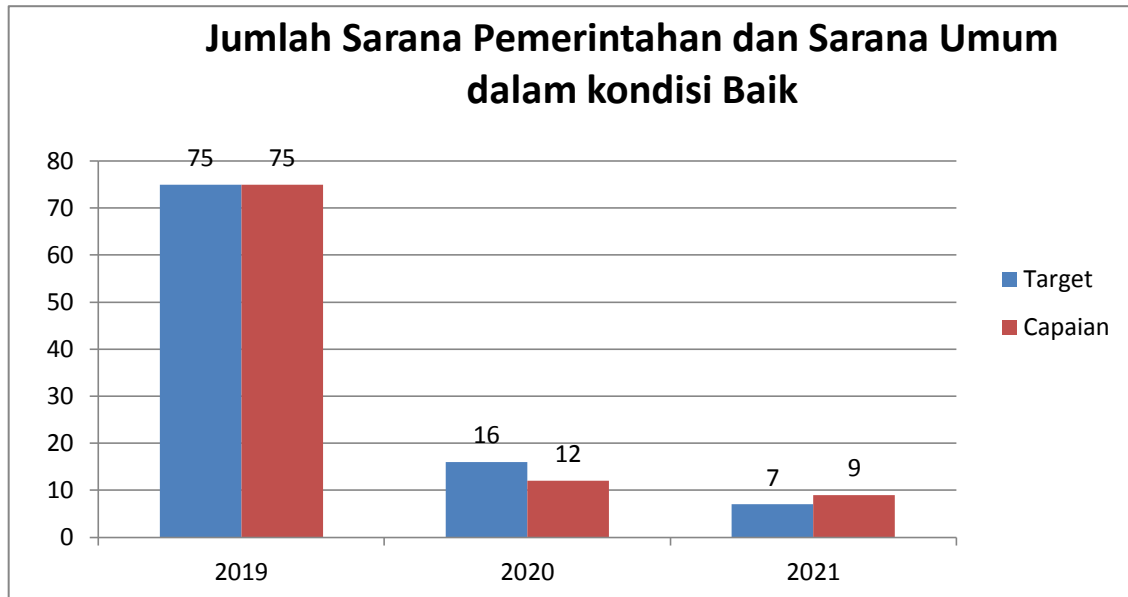


Tabel 3.19 Perbandingan Jumlah Sarana Pemerintahan dan Prasana Umum dalam Kondisi Baik Tahun 2019, 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah unit	75%	75%	16	12	7	9

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan Sarana Pemerintahan dan Prasana Umum dalam Kondisi Baik melampaui target.

Grafik 3.8. Perbandingan Pembangunan Sarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik Tahun 2019, 2020 dan 2021.



A.4.2. Indeks Kepuasan Layanan Jasa Konstruksi

Pengukuran indikator Indeks kepuasan layanan jasa konstruksi dari sasaran Meningkatnya kualitas jasa konstruksii ini diukur dengan memberikan nilai pada masing-masing jenis informasi yang diberikan. Target **Baik** untuk Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan pagu anggaran Rp.346.571.400,.,denga realisasi anggaran sebesar Rp. 664.656.448,- 99,17%. Program ini melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Kompetensi Penyelenggara Jasa Konstruksi
2. Advokasi/Pembinaan Kebijakan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3. Penyediaan Alat Lab. Konstruksi

Permasalahan dan solusi

1. Perlu bimbingan dan pelatihan bagi penyedia jasa konstruksi menyangkut masalah teknis dan manajemen pelaksanaan pekerjaan, agar tercipta pemahaman yang sama antar unsur proyek (pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat/ stakeholder yang ada).

A.4.3. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini mempunyai tujuan mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik, kongkrit sesuai dengan tata ruang dengan target Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya sebesar 46 % dengan pagu anggaran Rp. 540.000.000,. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 383.901.600,- 71,09%. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten
2. Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan Penataan Ruang Pertanahan
3. Pengendalian Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dan Pertanahan

➤ **Permasalahan**

- 1) Kurangnya SDM tentang Pemahaman Penyusunan Perencana mengenai Penataan Ruang.
- 2) Minimnya anggaran yang tersedia dalam penyusunan pedoman RDTR.

➤ **Solusi**

- 1) Melakukan pelatihan penguatan kapasitas SDM terkait penataan ruang
- 2) Penyediaan anggaran karena dalam penyusunan dokumen RDTR membutuhkan anggaran yang besar.

3.7 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan, secara keseluruhan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	Meter	5500	1898
		Jumlah Bendung yang Ditingkatkan	Unit	3	3
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang di Bangun	Meter	150	160
		Normalisasi /Restorasi Sungai	Meter	400	2385
		Jumlah Bendung Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Unit	44	40
		Jumlah Laporan Polisi Khusus Sumber Daya Air	Dokumen	12	12
		Jumlah Saluran Irigasi yang Dipelihara (Galian Sedimen)	DI	6	6
		Jumlah Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Sumber Daya Air (UPTD PSDA)	UPTD	3	3
		2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan	KM
Panjang jalan kabupaten yang terpelihara	KM			50	25,034
Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhab	5			Unit	4

3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Permukiman	Panjang jalan Kabupaten yang di inspeksi	KM	874.766	874.766
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	Unit	50	50
		Jumlah Alat Berat yang dipelihara	Unit	2	1
		Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum	Jumlah Jiwa	7800	7785
		Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak	Jumlah RT	500	350
		Panjang drainase yang terbangun	Meter	5285	4472
		Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan	Meter	711	655
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun	Unit	7	9
		Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	15	128
		Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang diawasi	Perusahaan	50	50
		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jenis	11	11
		Jumlah Dokumen RRTR	Dokumen	1	1
		Jumlah Laporan / Orang Sosialisasi	Orang	1000	1000
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	46	46

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2021 mengelola anggaran sebesar Rp. **121.256.201.097,-** dan terealisasi sebesar Rp. **110.815.765.685,-**. Atau sebesar **91,38%**. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% di sebabkan hampir semua untuk kegiatan fisik mengalami **Retensi** anggaran.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 3.21 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1	KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	P r o v	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penyelenggaraan Jalan	30.237.144.780	13.756.160.000	-	43.993.304.780	75,08%	39.409.503.929	89,58

Berdasarkan tabel 3.21 Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan menggunakan anggaran APBD Kabupaten dan APBN Rp. 43,993,304,780,-realisasi keuangan 89,58.- Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 3.22 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

N o.	KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K	1.746.032.638	-	-	1.746.032.638	83,18	1.516.143.370	86,83

	ota							
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.683.654.310	2.692.856.000	-	4.376.510.310	80,87	3.406.015.197	77.82

Berdasarkan tabel 3.22 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab sebesar Rp. 1.516.143.370 dengan realisasi keuangan 86,83%.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab. Dan APBN sebesar Rp. 4.376.510.310 dengan realisasi keuangan 77.82% Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program /kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 3.23. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

No.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD Kab.	DAK	APBD PROVINSI	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,363,074.700	-	-	4,363,074.700	58.66	3.952.817.260	90.59

Berdasarkan tabel 3.23 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota menggunakan anggaran APBD Kab Rp. 4,363,074.700, realisasi keuangan 90,59%.

Tabel 3.24. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

No.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD Kab.	DAK	APBD PROVINSI	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	751.576.600	-	-	751.576.600	92,12	706.100.700	93.95

Berdasarkan tabel 3.24. program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 751.576.600,- realisasi keuangan 93,95%.

Tabel 3.25. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

No.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.324.602.404	13.123.383.000		15.447.985.400	99,80	14.661.620.800	95

Berdasarkan tabel 3.25. program Penataan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 13.123.383.000 dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 2.324.602.404 dengan realisasi keuangan 95%.

Tabel 3.25. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

N o.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	795.650.600	4.501.607.000		5.297.257.600	0,512	5,194,941,200	97,42

Berdasarkan tabel 3.25 program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 4.501,607,000 dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 10.946.378.400,, dengan realisasi keuangan 97,42%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 3.26. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

N o.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	200.000.000			200.000.000	100	200.000.000	100

	Konstruksi							
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000			200.000.000	100	194.659.748	97.33
3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	249.996.700			249.996.700	100	249.996.700	100

Berdasarkan tabel 3.26 Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 200.000.000 realisasi keuangan 97,33%. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan Menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp 249.996.700 dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

Tabel 3.27. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	440.000.000			440.000.000	100	283.901.600	64,52
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000			100.000.000	100	100.000.000	100

Berdasarkan tabel 3.27 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 440.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar 64,52%. Adanya kegiatan Revisi RTRW yang belum rampung karena kegiatan itu menjadi acuan penggunaan anggaran sehingga anggaran yang tersedia tidak teralisasi sepenuhnya. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 100.000.000 ,realisasi keuangan 100%,.

Tabel .3.28. Program Penataan Bangunan Gedung

No	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APBD PROV.	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	33.395.680.015			33.395.680.015	1,285	30.584.479.595	92

Berdasarkan tabel 3.28 Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 33.395.680.015 dengan realisasi keuangan 92%.

Tabel .3.29. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	PROGRAM	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APB D PRO V.	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,091,400			56,091,400	100	56,091,400	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,683,801.002			9,683,801.002	100	9.416.988,853	99,08
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,160,000			87,160,000	100	87,040.000	99,85
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289,872,500			289,872,500	88	271,884,690	93,79
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.119.000			60.119.000	100	60.119.000	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.995.952			227.995.952	100	173,638,643	76
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.742.500			289.742.500	100	279,820,000	96,58

Berdasarkan tabel 3.29 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 10.694.782.354,- dengan realisasi keuangan 10.345.582.586 atau sebesar 96,73%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 disusun untuk memaparkan pencapaian tujuan. Sasaran dan Indikator kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2021. Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar terhadap publik. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam hal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ini yaitu :

1. Gambaran umum tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2021 dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target di beberapa kegiatan tertentu dikarenakan mengalami hambatan terutama terkait masalah anggaran, dengan adanya refocusion anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga pelaksanaan program secara optimal belum dapat dicapai..
2. Realisasi anggaran masih mengalami keterlambatan, hal ini terutama disebabkan oleh proses perencanaan dilaksanakan pada tahun yang bersamaan sehingga pelelangan terlambat dilaksanakan akhirnya tidak menyediakan tenggang waktu pelaksanaan yang cukup dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, akan mengakibatkan setidaknya dana sebesar 5% dari nilai proyek meluncur, hal ini mempengaruhi beban pendanaan pada tahun berikutnya belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksana kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga

pelaporan dilingkup interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 ini disampaikan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya pada tingkat atasan. Dengan keterbatasan tenaga dan waktu yang ada pada kami, kritik dan saran kami harapkan dari pihak lain guna menyempurnakan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita bimbingan, Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas di masa mendatang.

Polewali, 7 Maret 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,**

Ir. HUSAIN ISMAIL, ST.,M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 19720809 200502 1 003

